

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
KEPALA DESA DI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



WAWAN ANDIKA SAPUTRA
137310219

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah islam sebagaimana yang telah dicontohkan beserta para sahabat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tentu masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Desa Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”**.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dorongan, dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan terimakasih dengan penghargaan yang tulus kepada

1. Rektor Universitas Islam Riau, bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Moris Adidi Yogya, S.Sos.,M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si
4. Ibu Dr. Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang penuh kesabaran memberikan arahan, saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan arahan, saran-saran kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
7. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, kepada Ibunda Sarmiyati beserta kakak Suryani, Desi Lestari, adik Devi Sarnita Yurlis,riyan iranda, abang Suhelmi dan keluarga besar penulis yang telah memberikan motivasi baik secara moril yang selalu memberikan dukungan beserta kasih sayang kepada penulis yang luar biasa.
8. Terimakasih kepada teman-teman khususnya Reni Rahmawati SE, Dewanda Tiara Yeza, Reza Hendarsen, Irwandi, Ilfa Sukanda, Randi, anak kelas E khususnya angkatan 2013 yang telah berpisah jauh, dan teman-teman seperjuangan kos Filamori.

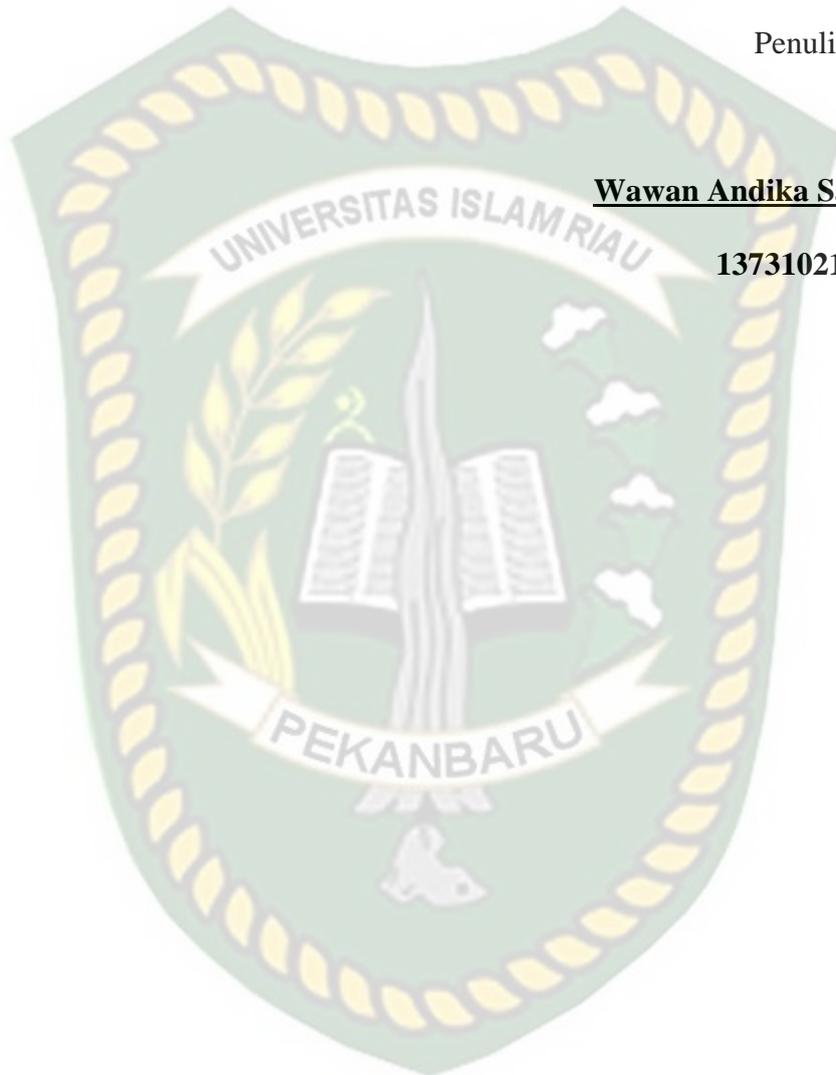
Akhir kata semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah yang akan membalas dan menjadikannya sebagai amal ibadah, Amin Yarabbal'alamin. Terimakasih.

Pekanbaru, 21 November 2019

Penulis

Wawan Andika Saputra

137310219



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
a. Pengertian pemerintahan	16
b. Fungsi Pemerintahan	21
c. Konsep Pemerintahan	22
d. Konsep Manajemen Pemerintahan	24
2. Konsep Peranan	27
a. Pengertian Peranan	27
3. Konsep Pembinaan	31
a. Pengertian Pembinaan	31
4. Konsep Pengawasan	34
a. Pengertian Pengawasan	34
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pemikiran	39
D. Konsep Operasional	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44

B. Lokasi Penelitian	44
C. Informan Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Keadaan Geografis	52
C. Visi dan Misi Kecamatan Teluk Meranti	53
D. Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Meranti	54
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informen	57
1 Usia Informen.	57
2 Jenjang Pendidikan Informen.	58
3 Masa Bekerja.	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian	59
1. Pembinaan	61
a. Tujuan dan saran	61
b. Pembinaan yang Profesional	65
c. Materi Pembinaan	68
d. Peserta Pembinaan	72
2. Pengawasan	75
a. Menetapkan Standar	76
b. Mengukur Kinerja	77
c. Membandingkan Kinerja dengan Standar	78
d. Menentukan kebutuhan tindakan koreksi	79
C. Faktor penghambat	84

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 86
B. Saran..... 88

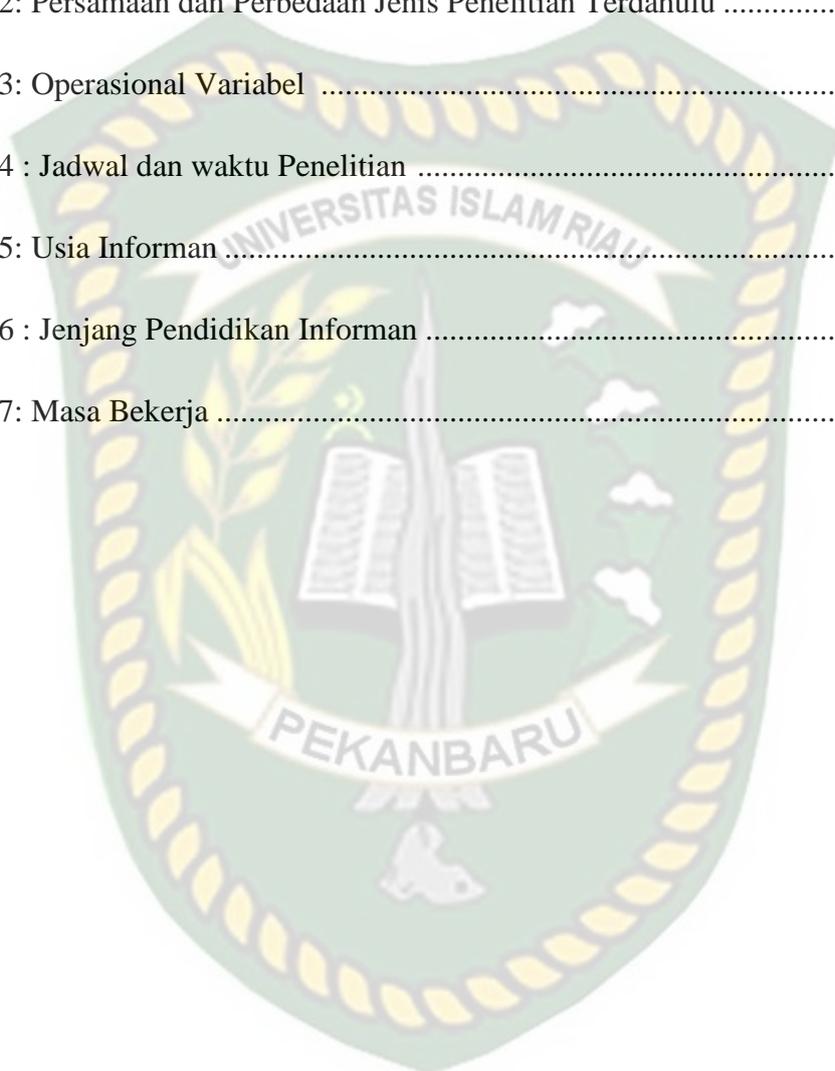
DAFTAR PUSTAKA



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan	7
Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Jenis Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3: Operasional Variabel	41
Tabel 4 : Jadwal dan waktu Penelitian	49
Tabel 5: Usia Informan	57
Tabel 6 : Jenjang Pendidikan Informan	58
Tabel 7: Masa Bekerja	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Langkah-langkah sistematika pengawasan Organisasi	36
Gambar 2 : Kerangka Pikir	40
Gambar 3: Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Meranti	54



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
Peserta ujian kompre Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawan Andika Saputra
NPM : 137310219
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Usulan Penelitian : Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 maka saya, menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Faklultas dan Universitas serta Hukum Negri RI.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 21 November 2019
pernyataan

Wawan Andika Saputra

**PERANAN CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN KEPALA DESA DI KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Wawan Andika Saputra

Kata kunci: Peranan, Pembinaan, Pengawasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui obyektifitas Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan pengawasan desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Permasalahan yang muncul yakni terutama mengenai Belum maksimalnya Peranan Camat dalam melakukukan Pembinaan dan Pengawasan kepala Desa Dikecamatan Teluk Meranti, dalam Pelaksanaan Tugas,” peraturan pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 terdapat dalam poin (g) serta Kurangnya koordinasi Camat dalam memfasilitasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum. Contohnya masih ada terdengar suara hiburan yang mengganggu ketentraman masyarakat dan Dalam hal ini Camat harus benar-benar dapat menggerakkan dan Mengarahkan pegawainya, sehingga nantinya tidak menimbulkan hambatan dalam Proses dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Indikator penilaian Peranan Camat Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang di gunakan meliputi, Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti tujuan dan saran pembinaan, pembinaan profesional dan meteri pembinaan , Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti menetapkan dan mengukur standar kinerja.. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ini adalah survei diskriptif, yaitu dengan memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian di jadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu camat teluk meranti dan kepala desa. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang dikumpulkan dengan teknik daftar kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang didapat menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data peneliti yang dipergunakan dengan bantuan tabel frekuensi berdasarkan analisis ini serta berdasarkan hasil penelitian peneliti menilai serta dapat menyimpulkan bahwa Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan pengawasan desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan sudah berjalan dengan cukup baik dan masih berada pada interval kurang baik.

**THE ROLE OF CAMAT IN DOING THE DEVELOPMENT AND
SUPERVISION OF THE VILLAGE HEAD IN THE DISTRICT OF TELUK
MERANTI, PELALAWAN DISTRICT**

ABSTRACT

Wawan Andika Saputra

Keywords: Role, Demand, Supervision

This study aims to determine the objectivity of the Camat's Role in Conducting Guidance and supervision of villages in the District of Teluk Meranti Pelalawan Regency. The problems that arise are mainly regarding the suboptimal role of the sub-district head in carrying out the fostering and supervision of the village head of the Teluk Meranti sub-district. Peace and public order. For example there are still sounds of entertainment that disturb the peace of the community and in this case the sub-district head must really be able to move and direct his employees, so that later it will not cause obstacles in the process and in the administration of village government. include, Guiding the Implementation of the Village Government such as the objectives and suggestions for coaching, professional coaching and coaching methods, Overseeing the Implementation of the Village Government such as setting and measuring performance standards. as a data collection tool and data collected with this tool is then made into the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location carefully. There are two population groups and samples in this study, namely meranti bay sub-district head and village head. Types and data collection techniques used consist of primary data collected by questionnaire and interview list techniques, and secondary data obtained using observation techniques. While the researchers' data analysis techniques used with the help of frequency tables based on this analysis and based on the results of research researchers assess and can conclude that the Role of the Camat in Conducting Guidance and supervision of villages in the District of Teluk Meranti Pelalawan Regency has been running quite well and is still at a bad interval .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi undang-undang dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupa untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur dalam permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Yang mana tercermin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yang menyebutkan “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Didalam negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh menteri-menterinya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, masing-masing menteri-menterinya yang dipilih langsung oleh Presiden dan serta mempunyai tugas pokok intinya, menteri-menteri berhak menjalankan tugas masing-masing berdasarkan bidang yang telah ditetapkan oleh Presiden. Menteri-menteri yang telah mendapat mandat tugasnya masing-masing harus berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah untuk kelancaran tugas sebagai kaki tangan seorang Presiden.

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamkan dan diatur dalam

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUD NKRI tahun 1945 yaitu “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik” ini menunjukkan bahwa pada negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat negara atau tidak ada negara dalam negara. Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena sejak berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal dengan otonomi daerah yang dipayungi oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur negara atau pegawai sebagai abdi negara dan

masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah provinsi ataupun kabupaten dan kota.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbiincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/ berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Disamping sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik ini juga dipicu adanya pengaruh perubahan paradigma ilmu administrasi, termasuk perubahan global yang terjadi di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai belahan dunia.

Kalau dahulu rakyat yang melayani negara/pemerintah, maka sekarang pemerintah/ negara menjadi pelayanan bagi rakyatnya. Terjadinya paradigma tersebut, disamping karena adanya tuntutan masyarakat, demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk didalamnya tuntutan desentralisasi/otonomi daerah, perubahan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi dan teknologi transportasi juga tidak terlepas dari perubahan paradigma ilmu administrasi publik itu sendiri.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas-

tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun tugas tersebut tidak dalam serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Lembaga supra Desa selalu melakukan pembinaan kepada Desa melalui Tugas bantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan didesa, meskipun Desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala Desa sebagai unsur eksekutif didesa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota badan permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif didesa. Adapun tugas Camat berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pada Pasal 225 ayat (1) ialah

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagai yang dimaksud pada Pasal 25 ayat (6)
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara

- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan perangkat Daerah diKecamatan
- g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Desa/Kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang ada dikecamatan
- i. Melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

Tugas Camat sebagai Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdapat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pasal 10 disebutkan tugas umum Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat meliputi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang mengatur pelaksanaa urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan perasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan dikecamatan
- g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang mengatur Desa

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dileksanakan oleh unit kerja prangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan

Dari sejumlah tugas Camat yang diuraikan di atas, salah satu tugas yang menjadi perhatian penulis ialah pada huruf (g) yaitu, melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa. Pembinaan yang dilakukan Camat sebagai perpanjangan Bupati dalam mengefektifitaskan jalannya roda Pemerintahan pada tingkat Desa.

Camat Melakukan Kewenangan Bupati untuk dilaksanakan yang salah satunya yaitu melakukan Pembinaan terhadap Desa. Pemerintahan Kecamatan merupakan tingkat Pemerintahan dibawah pemerintahan Kabupaten dimana pemerintahan Kecamatan mendapatkan tugas untuk meningkatkan pelayanan Kepada masyarakat. Mengingat Perana Kecamatan tersebut dan adanya tuntutan dari Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pablik yang lebih baik, makah diperlukan kemampuan pemeritahan Kecamatan yang memadai.

Kecamatan adalah perangkat daerah yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota yang diuntut selalu produktif dalam menjalankan tugasnya sehinga tujuan Negara dapat tercapai dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Kecamatan yaitu bagian wilaya Administratif di Indonesia dibawah

Kabupaten/Kota. Kecamatan terdiri dari Desa desa atau Kelurahan dalam pelayanan masyarakat dipemerintahan Terutama didalam daerah Kecamatan disini dituntut melakukan pelayanan dengan baik.

Tabel 1: Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa/Kelurahan di Kecamatan Tteluk Meranti Kabupate Pelalawan pada Tahun 2018

No	Kelurahan/Desa	Dusun	Jumlah Penduduk
1	Desa Gambut Mutiara	Dusun 1 : Kadus : Dewi	1.218 juwa
		Dusun 2 : Kadus : Ilias	
		Dusun 3 : Kadus : Wardi	
2	Kuala Panduk	Dusun1 : Kadus : Mardi	1.502 Jiwa
		Dusun 2 : Kadus : Arizal	
		Dusun 3 : Kadus : T. Suandi	
3	Labuhan Bilik	Dusun 1 : Kadus : Firman Laisa	1.405 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Agus Salim	
		Dusun 3: Kadus : Muhtar	
4	Pangkalan Terap	Dusun 1: Kadus : Teachin	1.471 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Susilah Wati	
		Dusun 3: Kadus : Aprindo	
5	Patodaan	Dusun 1: Kadus : Afrizal	984 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Zulfahmi	
		Dusun 3: Kadus : Ucok Siregar	

No	Kelurahan/Desa	Dusun	Jumlah Penduduk
6	Pulau Muda	Dusun 1: Kadus : Herman	5.400 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Musa Bakri	
		Dusun 3: Kadus : Decky Andrian Zulkar	
		Dusun 4: Kadus : Darmansyah	
7	Segamai	Dusun 1: Kadus : Jasman	1.233 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Jefri	
		Dusun 3: Kadus : Izul Evendi	
8	Teluk Binjai	Dusun 1: Kadus : Eko	1.125 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Zuliandi	
		Dusun 3: Kadus : Decky	
9	Teluk Meranti	Dusun 1: Kadus : Ramodin	1.002 Jiwa
		Dusun 2: Kadus : Omi	

Sumber : data olahan penulis berdasarkan observasi langsung ke lapangan pada bulan September tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas maka terdapat 9 Desa atau Kelurahan yang menjadi tanggung jawab Teluk Meranti dalam melakukan Pembinaan terhadap kepala Desa, dalam hal ini peneliti hanya mengambil sampel sebanyak 5 desa yaitu pada desa Gambut Mutiara, Pulau Muda, Labuhan Bilik, dan Segamai barat.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, Kedudukan, tugas dan Fungsinya secara legistik diatur dengan peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan Kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan Juga akan mengembang penyelenggaraan Tugas-Tugas umum Pemerintahan.

Dengan demikian, Fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah Kecamatan Teluk Meranti, Atas dasar Pertimbangan, maka Ccamat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya. Camat sebagai pemimpin Organisasi pemerintahan Kecamatan memegang tanggung jawab yang cukup besar Terhadap maju mundurnya suatu Kecamatan.

Dalam hal ini, Camat harus benar-benar dapat menggerakkan dan Mengarahkan pegawainya, sehingga nantinya tidak menimbulkan hambatan dalam Proses dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi wilayah Kerja Kecamatan tersebut. Sebagai pemimpin yang tertinggi di Kecamatan, Camat Mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menggerakkan dan memberikan Pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka untuk mendasari pelaksanaan penelitian yang sedang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa fenomena sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya Peranan Camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepala Desa Dikecamatan Teluk Meranti, dalam Pelaksanaan Tugas,” peraturan pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 terdapat dalam poin (g). Pelaksanaan tugasnya yaitu dalam penyusunan program yang diberikan Camat kepada Kepala Desa, oleh sebab itu diperlukannya Pembinaan dan Pengawasan di Kecamatan Teluk Meranti.
2. Kurangnya koordinasi Camat dalam memfasilitasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum. Contohnya masih ada terdengar suara hiburan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Dengan melihat permasalahan di atas penulis ingin melakukan penelitian di Kantor Camat Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan mengangkat judul penelitian *“Peranan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa di kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan”*.

B. Rumusan masalah

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada latar belakang di atas maka seorang camat memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan kualitas dari kepala desa di masing-masing desa yang di bawah naungannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan?

2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

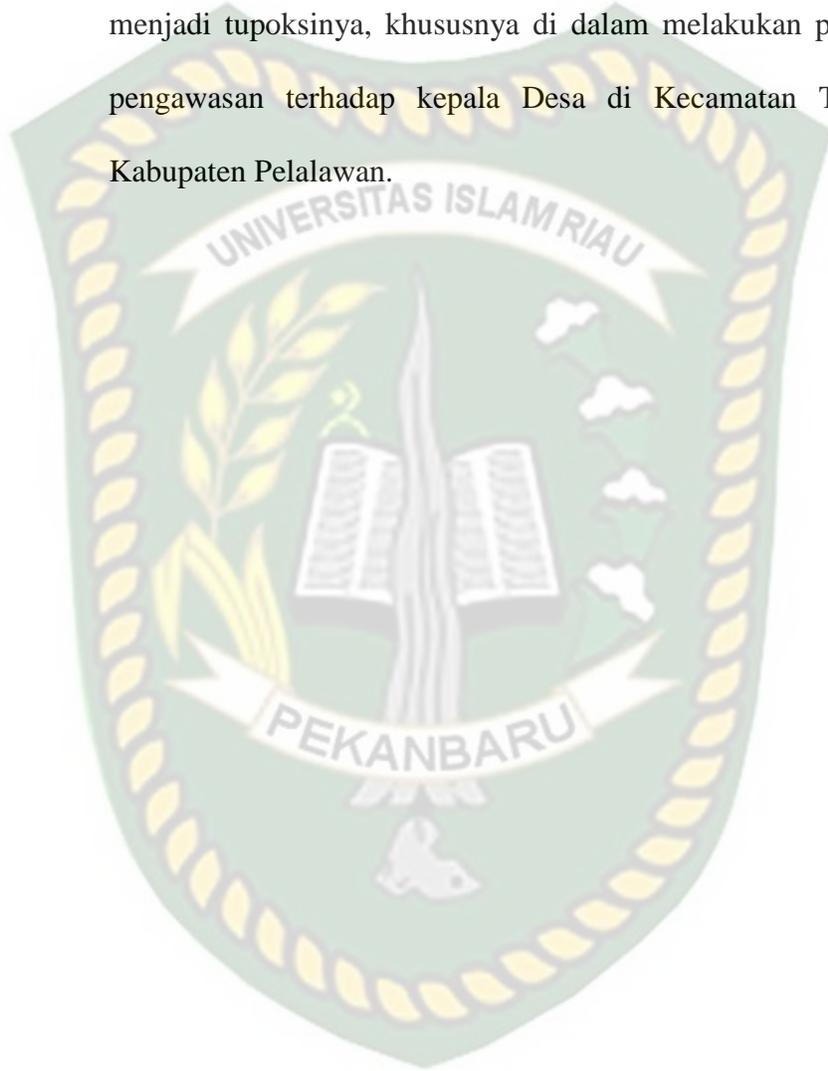
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Peranan Camat dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor penghambat yang dialami oleh Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan Memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat Memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu Pemerintahan.
- b. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama khususnya di bidang pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap pemerintah Desa.

- c. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Camat Teluk Meranti di dalam memaksimalkan kinerja yang sudah menjadi tupoksinya, khususnya di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevannya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkai beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut.

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diatur peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan,

maupun desa dan kelurahan serta semua bagaian elemen yang mendukung lainnya.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (Serdamayanti:2004;195).

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikaitkan sebagai pemerintahan yang dihormati kedudukan rakyatnya yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahannya melaksanakan kordinasi dan kemampuan kepemimpinan bidang legeislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan yang merupakan sebagaimana mendukung dan tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff;1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk satu pembaharuan struktur biokrasi publik yang lebih disentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefenisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapatkan keleluasaan untuk melakukan deskripsi yang adaptif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Pada birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang sangat diperlukan didalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern) organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatan dengan baik sebagai individu. Disamping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dan kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan peranan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu :

struktur organisasi, personil dan financial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelemahan sistem. Struktur yang ketat dan terintegrasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dan tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi realitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan diterapkan dengan perturan daerah. (Nurcholis, 2005;133). Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang didalam pelaksanaannya tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagai ueusan otonomi daerah, secara hukum publik menurut Ridwan (2014:334) adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban, sejalan dengan prinsip umum “(*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid, thtee is no authority without responsibility, ia sulhota be la mas-uliati*)”. Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota maupun sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban camat kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktual camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemetintahan menurut Rasyid (2002;14) antara lain ialah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak jadi pemberontak didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memberikan ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil pada setiap warga negara masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum untuk memberikn pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain tercapainya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011;37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintahan yaitu membuat kebijakan politik. Argumentasi kepentingan terpenting ialah bahwa semua warga negara akan bersentuhan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kabutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham sumber-sumber negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari jumlah aspek penting dari kegiatan (dinamika) struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorientasi, bersumber kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara serta tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melakukan fungsi atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dn

kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Fungsi Pemerintahan

Fungsi pemerintahan menurut The Liang Gie dalam Tangkilisan (2005;43) adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, atau pun pertimbangannya lainnya. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha kerja sama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi. Fungsi pemerintahan meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (services), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation), dan pemberdayaan (empowering). (Kaloh,2009;15) Selanjutnya menurut Rasyid dalam Ndraha (2005;58) bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).

1. Fungsi Pelayanan (service)

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar dari pada negara maju.

c. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa

defenisi, antara lain ada yang mendefenisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, ada pula yang mendefenisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua defenisi yakni dalam arti sempit dan luas, dalam arti luas pemerintahan didefenisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalnakan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefenisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badab-badab publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011;11) organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerja sama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011;12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedaras dari seluruh badan usaha.

d. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Feriyanto dan Shyta (2015;4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan sebagai proses kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan dan keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut pendapat Siagian (2003;5) menyatakan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literatur ilmu administrasi dan manajemen, juga ditemukan sudut pandang yang berbeda dikalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau defenisi konsep.

Defenisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan tentang sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie (dalam Zulkifli 2009;16) menurutnya manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan penggerakan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 fungsi utama : perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan dan penyempurnaan.

Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta berbagai cara-cara mengerjakannya.

1. *Pembuatan keputusan* adalah kegiatan yang melakukan pemeliharaan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
2. *Pengarahan* adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jelas memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
3. *Pengkoordinasian* adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan

keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap, serta mencegah pertentangan, kekacauan, kekembaran, kekosongan tindakan.

4. *Pengontrolan* adalah kegiatan yang mengusahakan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan yang ditetapkan.

5. *Penyempurnaan* adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Menurut Manullang (2002;3) bila mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyo (dalam Terry,2004;7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen suatu seni (*art*) dan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen. Ciri-ciri manajemen sebagai ilmu :

- a. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat.

- b. Dalam proses pencapaian tujuan seringkali melibatkan unsur naluru.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan faktor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

2. Konsep Peranan

a. Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia peranan berasal dari kata *peran*. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan pengertian diatas, diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu tingkat kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan yang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan dari:

1. Obyeknya sudah ada akan tetapi masih belum siap sempurna maka akan dijadikan sempurna, atau yang sedikit dijalankan menjadi banyak, duluaskan atau diperindah.
2. Obyeknya sudah sempurna dipelihara terus menerus untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi setruktur sosial masyarakat. Peranan (role) merupakan suatu proses dinamis kedudukan (ststus). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan begitu juga proses sebaliknya. (Soekanto,2009;212-213)

Levinson dalam Soekanto (2009;213) mengatakan peranan mencakup tiga hal diantaranya :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007;67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peranan disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan peran dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status sosial khusus.

Sukanto dalam Rauf (2001;269) menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batasan-

batasan tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.

Dari departemen tersebut disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditunjukkan seseorang karena kewajiban atau jabatan atau pekerjaannya. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaannya. Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seseorang camat juga mempunyai peran pembinaan perangkat desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai seorang pemimpin harus mengambil langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas yang akan diambil dalam membina perangkat kepenghuluan.

Menurut Rivai(2004;148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan agar seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (dalam Epriandi,2010;50) peranan adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam

terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang lebih memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Winardi dalam Indrayeni(2011;12) menjelaskan peranan sosial adalah peranan yang diharapkan oleh masyarakat (atau bagian-bagian dari padanya) yang dilakukan oleh seseorang yang karena kualitas-kualitas serta sarana tertentu yang dimilikinya diperkirakan dapat memenuhi harapan tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kata peranan yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan. Peranan dari seseorang pemimpin itu sangat menentukan dan sangat besar pengaruhnya bagi keberadaan ditengah-tengah masyarakat dalam menggerakkan dan mengarahkan keinginan dan tujuan bersama dalam menjalankan pembangunan.

Peranan secara sederhana berasal dari kata “peran” yang kemudian mendapat akhiran “an” menjadi “peranan”. Menurut kamus besar bahasa indonesia Depdikbud(1990;667) “peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan”.

Jadi pengertian peranan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh pemimpin sesuai dengan kedudukan

didalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya sesuai dengan perkembangan yang ada didalam masyarakat itu sendiri.

3. Konsep Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Menurut Mathis (2002;112) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Mathis (2009;307-308) juga mengemukakan 4 tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk menggambarkan rencana pembinaan setrategis antara lain:

- a. Mengatur setrategi, Yaitu manager-manager SDM dan pembinan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara setrategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- b. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembinaan yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan tujuan dan harapan dari pembinaan harus

diidentifikasi secara diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.

c. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan berbagai pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.

d. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Sedangkan Ivancevich (2008;46) mengidentifikasikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya sehubungan dengan defenisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi kemasa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kopentensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

b. Indikator Pembinaan

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara(2005;76) terdiri dari:

- a. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan diukur.
- b. Para pembinaan yang profesional.
- c. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.
- d. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang sistematis. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu perencanaan pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

c. Unsur Pembinaan

Mangunhardjana (2004;17) mengatakan bahwa unsur didalam pembinaan harus diperhatikan dalam hal-hal seperti dibawah ini

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengaturan para peserta pembinaan yang berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak sesuai dengan teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan

pengalaman para peserta dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

3. Isi tidak terlalu banyak, tetapi sisesuaikan dengan daya tangkap peserta dengan waktu yang tersedia.

4. Konsep Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan oraganisasi. Fungsi yang ada dalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menurut Griffin(2004;44). Keempat fungsi manajemen harus dilakukan oleh seorang manager secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005;317) mendefenisikan pengawasan merupakan proses dalam menepatkan ukuran kinerja dalam pembinaan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006;303) mengatakan bahwa pengawasan merupakan sebagian proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan

informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan kepada karyawan.

Defenisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan operesionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap(2001;14) pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya pencapaian keseluruhan organisasi. Sedangkan menurut Maringan (2004;61) pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut, juga dimaksud untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadian dikemudian hari. Menurut Siagian (2003;30) bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas

pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar dapat berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum nerarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan dan penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

b. Langkah-langkah Pengawasan

Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 langkah fundamental dalam setiap prosesnya (Griffin,2004;167) langkah-langkah tersebut di ilustrasikan dan dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1 : Langkah-langkah Sistem Pengawasan Organisasi
(Griffin,2004;167)



Masing-masing langkah ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Standar, adalah target yang mencapai acuan perbandingan untuk kinerja kemudian hari. Standar yang diterapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam penentuan standar, diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja.
- b. Mengukur Kinerja, adalah aktivitas konstan dan kontinue bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja karyawan biasanya diukur berbasis kualitas dan kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerja, pengukuran kinerja harus lebih mendetail.
- c. Membandingkan kinerja dengan standar, tahap ini dimaksud dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Hasil pekerjaan karyawan dapat diketahui melalui laporan tertulis yang disusun karyawan, baik laporan rutin atau laporan khusus.
- d. Menentukan kebutuhan tindakan korektif, berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manager. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manager dapat memilih salah satu tindakan : status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengukur standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan

hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti sebagai berikut :

Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan jenis Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Penulis sedang Kerjakan saat ini.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rima Dona Fitri 2012	Peranan Camat dalam membina administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak	Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode Kualitatif.	Perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian, waktu, dan juga focus penelitian, dimana penulis melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berlokasi di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, dan penelitian yang sedang penulis lakukan didasari pada peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sementara untuk penelitian terdahulu menggunakan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.
2	Aphum Humokor	Peranan Pemerintahan Kecamatan Dalam Melakukan Pelaksanaan	Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan	Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang sedang penulis teliti terletak pada lokasi yang berbeda

		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Admitrasi Desa Di Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	yaitu dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode Kualitatif.	
3	Delpi Susanti 2016	Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode Kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, populasi, sample dan teknik analisis data.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Gambar 2 : Kerangka Pikir Tentang Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Desa Di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.



Sumber : modifikasi penulis 2018

D. Konsep Operasional Variabel

Tabel 3 : Operasional variabel tentang Peranan Camat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto 2008;35).	1. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.	a. Tujuan dan saran pembinaan dan pengembangan.	1. Penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa. 2. Menetapkan jadwal sosialisasi dan pembinaan. 3. Melakukan koordinasi kerja dengan kepala desa.
		b. Pembinaan yang profesional	1. Melakukan studi sebelum memberikan pembinaan. 2. Memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pembinaan. 3. Proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan.
		c. Materi pembinaan dan pengembangan yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai	1. Menetapkan sasaran kerja. 2. Menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja. 3. Materi pembinaan dapat

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
			dimengerti dengan baik.
		d. Peserta pembinaan yang memenuhi persyaratan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta pembinaan harus perangkat pemerintah desa. 2. Pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan. 3. Memahami program yang disusun atau direncanakan.
Peranan adalah aspek dinamis kependudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2008;35)	2. Mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan.	a. Menetapkan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan standar jumlah pegawai pemerintahan desa. 2. Menetapkan target pelaksanaan program pemerintahan desa. 3. Menetapkan jadwal pengawasan.
		b. Mengukur kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan kerja dari pemerintah desa. 2. Melakukan pengawasan secara langsung. 3. Melakukan koordinasi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
			kepada masyarakat terkait kinerja pemerintahan desa.
		c. Membandingkan kinerja dengan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan. 2. Membandingkan hasil kerja dengan target yang diberikan sebelumnya. 3. Melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan desa.
		d. Menentukan kebutuhan tindakan koreksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan terkait hasil kerja pemerintahan desa. 2. Memberikan penghargaan apabila target tercapai. 3. Memberikan tindakan sanksi apabila target tidak tercapai.

Sumber : olahan penulis tahun 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, kategori bentuk dan tipe penelitian ini termasuk didalam jenis pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013;13) penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. peneliti merupakan instrument kunci yang mengumpulkan data secara trigulasi (gabungan) analisis data bersifat instruktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dan generalisasi.

Sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan menjekaskan terkait dengan penelitian yang berjudul Peranan Camat dalam Melakukan Pembinaan Pengawasan Kepala Desa Di kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Daerah Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang ditemukan yaitu masih kurangnya pelaksanaa pembinaan terhadap aparatur Desa yang dilaksanakan oleh Camat Teluk Meranti dan belum terlaksana proses pengawasan yang dilkakukan camat di

Desa-desa di Kecamatan Teluk Meranti, Dan Kurangnya koordinasi camat dalam memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Contohnya masih ada terdengar suara hiburan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

C. Informan Penelitian

Informan menurut Meleong (2006;132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

1. Kepala Desa Labuhan Bilik
2. Kepala Desa Pulau Muda
3. Kepala Desa Segamai Barat
4. Kepala Desa Gambut Mutiara

Key informan adalah mereka yang tidak hanya memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Adapun yang dijadikan key informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Camat Teluk Meranti

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menurut jenisnya terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel dan data ini digunakan untuk mengukur peranan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa di kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen, dimana data tersebut sudah berbentuk data yang sudah artinya tidak perlu diolah lagi. Data ini berisikan dengan lokasi penelitian seperti data terkait dengan program yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan berdasarkan tujuan penyelidikan, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian.

2. Teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan,2007;30).
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan dan pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1982) dalam Sugiyono (2007;91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data reduction* (Reduksi Data) yaitu data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka data tersebut peneliti catat sebagai teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sugiyono (2007;92)
2. *Data display* (Penyajian Data) yaitu dengan bentuk uraian dan bagan-bagan yang diperlukan. Penyajian data bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan sejenisnya. Sugiyono (2007;95)

3. *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Table 4 : Jadwal dan waktu penelitian tentang Peranan Camat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

	Jenis Kegiatan	Bulan dan minggu ke pada Tahun 2018																							
		Agustus				September				Oktober				November				Desember				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal								■																
3	Revisi Proposal								■	■	■	■	■												
4	Kuisisioner												■												
5	Rekomendasi Survey												■												
6	Survey Lapangan												■												
7	Analisis Data																■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																■	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				■	■	■	■	■
11	Revisi Skripsi																					■	■	■	■
12	Skripsi																								■

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau yang memiliki luas wilayah 13.924,94 Km² dan jumlah penduduknya mencapai 356.945 jiwa dan tersebar di 12 kecamatan, salah satu Kecamatan yang mempunyai kewajiban dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintah Desa/Kelurahan ialah Kecamatan Teluk Meranti yang memiliki luas wilayah mencapai 421.281,53 Ha dengan luas daratan merupakan Kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Teluk Meranti memiliki 1 Kelurahan dan 8 Desa, yang mana di dalam Kecamatan Teluk Meranti terhadap Jumlah penduduk sebanyak 14.834 Jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 7.703, dan populasi perempuannya mencapai 7.131 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3.649 jiwa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan pada pasal 3 menjelaskan bagaimana Kedudukan Camat, Tugas Pokok Camat serta Fungsi Camat. Adapun penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, di Pimpin oleh seorang Camat.

- b. Camat sebagaimana di masukkan dalam ayat (1) berkedudukan sebagai Koordinator penyelenggara Pemerintahan diwilayah kerjanya, berada dibawah Dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- c. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan Perundang-Undangan.
- d. Pelimpahan Wewenang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) di tetapkan dengan keputusan Bupati
- e. Segaian Tugas Camat sebagaimana yang dimasukkan pada ayat (4) dapat di Limpahkan kepada Lurah.

Teluk meranti adalah sebuah kecamatan di kabupaten pelalawan, Riau, Indonesia. Keadaan alamnya yaitu berupa daratan rendah rawa-rawa dengan lahan gambut yang cukup luas. Wilayah teluk Meranti dibelah oleh aliran sungai kampar yang bermuara ke selat malaka. Sepanjang aliran sungai tersebut membentang hutan lebat tropis yang sangat luas dikedua sisi sungai tersebut. Penduduk asli Teluk Meranti adalah suku Melayu. Mata pencarian penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, kehutanan dan lain sebagainya. Potensi besar yang ada pada teluk meranti yaitu bidang pariwisata, yaitu objek wisata fenomena alamnya berupa ombak bono yang terdapat disungai kampar. Dikecamatan Teluk Meranti memiliki 9 desa yang terdiri dari:

1. Gambut Mutiara
2. Kuala Panduk
3. Labuhan Bilik

4. Pangkalan Terap
5. Petodaan
6. Pulau Muda
7. Segamai
8. Teluk Binjai
9. Teluk Meranti

Berdasarkan desa diatas maka penulis hanya melakukan penelitian di 4 desa yaitu Labuhan Bilik,dan Pulau Muda, Segamai Barat, dan Dambut Mutiara. Alasan penulis memilih 4 desa diatas tersebut adalah karena jarak tembuh yang dituju oleh peneliti terjangkau, dan aktifnya kantor desa yang ada dikecamatan Teluk Meranti tersebut.

B. Keadaan Geografis Kecamatan Teluk meranti

Kecamatan teluk meranti terletak dibagian timur wilayah kabupaten Pelalawan. Perbatasan Kecamatan Teluk Meranti langsung dengan Kecamatan Pelalawan, kecamatan bandar Petalangan, kecamatan kerumutan,dan kecamatan kuala kampar.selain berbatasan langsung dengan kecamatan kecamatan lain didalam kabupaten pelalawan,kecamatan teluk meranti juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu kabupaten indragiri hilir.

Kecamatan teluk meranti memiliki luas 4.239,44 km atau sekitar 30,45 persen dari total wilaya kabupaten pelalawan.sebagai wilaya adalah daratan (92,25 persen) yang didomanasi berupa perkebunan kelapa sawit (3,40 persen) dan hutan rawa (tercata sebanyak 15 sungai dengan total

panjang 24.628,95 km) selain itu areal penangkapan ikan di beberapa wilayah sungai juga dijadikan sarana transportasi. Selain sungai, kecamatan Teluk Meranti tercatat memiliki 5 potensi danau dengan 731,50 ha.

C. Visi dan Misi Kecamatan Teluk Meranti

Ada pun untuk meningkatkan pelayanan di daerah Teluk Meranti maka daerah Teluk Meranti memiliki visi, misi, dan motto sebagai berikut:

1. Visi

Visi “perubahan menuju terwujudnya pelayanan maksimal, seni budaya, pariwisata, dan kerukunan masyarakat”.

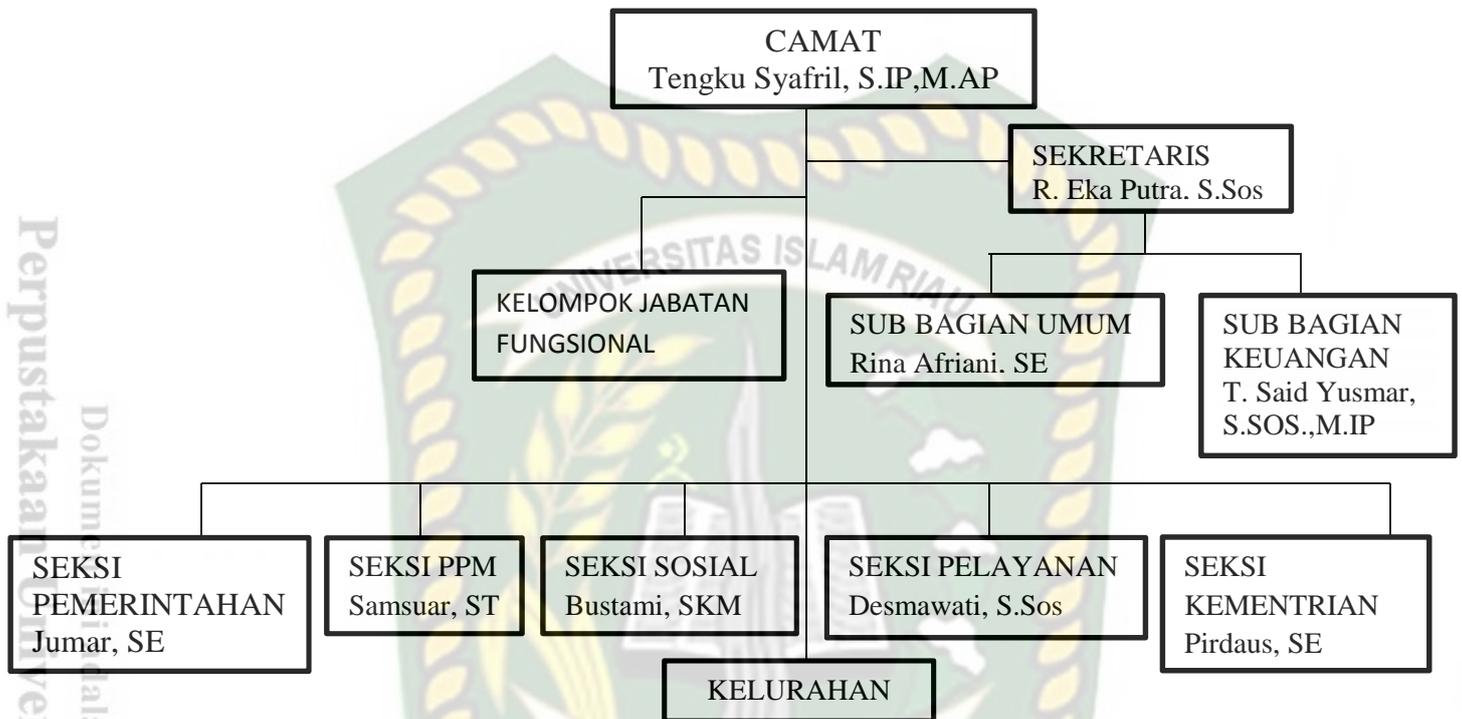
2. Misi kecamatan Teluk Meranti

- a. meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan.
- b. mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana.
- c. menciptakan sarana pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat.
- d. meningkatkan sarana seni dan budaya.
- e. meningkatkan sarana keagamaan.

D. Struktur Organisasi Kecamatan Teluk Meranti

Berikut ini struktur organisasi pemerintahan kecamatan teluk meranti

Gambar 3: Struktur organisasi Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor camat Teluk Meranti 2019

Pemerintah Teluk Meranti dipimpin oleh seorang camat dan dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang sekretaris dan kelompok jabatan fungsional. Seorang sekretaris dibantu oleh sub. Bagian umum dan sub bagian keuangan untuk memudahkan pengurusan administrasi kecamatan. Dan seorang camat dibantu oleh jabatan lainnya.

a. Desa Labuhan Bilik

1. Sejarah Desa Labuhan Bilik

Pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 1979 dibukalah sebuah kampung diberi nama Labuhan Bilik, Labuhan diambil dari

kata Pelabuhan sedangkan Bilik artinya kamar dimana kamar tempat orang beristirahat, yang labuhan Bilik terletak dikawasan kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Kamar Provinsi Riau dengan luas desa 7,858 Km perbatasan dengan utara perbatasan dengan desa serapung, barat berbatasan dengan desa Gambut Mutiara, selatan berbatasan Kabupaten Inhil, Timur berbatasan dengan desa Sungai Mas. Dengan jumlah penduduk 17 kepala keluarga, Labuhan Bilik juga terdapat satu buah pulau yang diberi nama pulau UNTUT ialah untuk tenaga yang mana dipulau UNTUT Labuhan Bilik dahulunya terkenal tempat persinggahan orang-orang berlabuh untuk menyelamatkan sperahu atau pomponnya dari gelombang besar atau angin ribut.

2. Visi dan Misi Desa Labuhan Bilik

Visi terwujudnya desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, yang bersih bersatu, beriman bertakwa kepada tuhan yang maha esa dalam proses pembangunan desa yang bermasyarakat makmur sejahtera mandiri dan bermartabat.

3. Misi

1. Merangkai suku membangun desa.
2. Bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun desa Labuhan Bilik,

3. Memfungsikan lembaga-lembaga yang ada didesa demi terciptanya pelayanan terhadap masyarakat.
 4. Mensejahterakan masyarakat melalui pertanian, dan perkebunan yang unggul.
- b. Desa Pulau Muda

Sejarah Desa Pulau Muda

Desa Pulau Muda berada Dikabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Provinsi Riau. Luas wilayah desa Pulau Muda adalah 95.460 ha dan kawasan desa seluas 66.215,54ha berada di dalam kawasan KHG Sungai Siak Kampar, dan sisanya seluas 29.245,08 berada di kawasan KHG sungai Kampar Sungai Gaung. Jumlah penduduk desa Pulau Muda adalah 5.492 jiwa. Sebagian besar masyarakat bermata penvcarian sebagai petani, nelayan, buru, dan lainnya. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Lanus, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantanyan, sebelah Timur dengan desa Segamai, sebelah Bareat berbatasan dengan Desa Teluk meranti.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas informan adalah keterangan yang diperoleh dari informan ialah berupa data wawancara yang dilakukan peneliti yang berisi mengenai jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan lama bekerja. Dari Camat Teluk Meranti dan kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti.

1. Usia informan

Usia informan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi usia seseorang maka pola pikir akan semakin dewasa dan akan mempengaruhi data dan informasi yang diberikan. Untuk mengetahui usia informan maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5: Karakteristik Informan Berdasarkan Usia Camat dan Kepala Desa

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	<25 tahun	-	-
2	25-40 tahun	3	60%
3	>41 tahun	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: *Olahan Data 2019*

Dari table 6 di atas dapat dikatakan bahwa usia informan yang paling produktif dalam bekerja yaitu kisaran usia 25-40 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 60%, sedangkan usia lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak 2 orang dengan presentase sebanyak 40%. Berdasarkan uraian usia informan diatas, dapat disimpulkan bahwa diusia yang sangat produktif, sehingga dengan tingkat usia kepala Desa dan Camat yang sangat menunjang untuk dapat

dijalankan dengan sebaik mungkin dan memberikan hasil yang maksimal untuk Desa.

2. Jenjang pendidikan Informan

Karakteristik informan sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, Dimana semakin tinggi pendidikan informan maka data dan informasi yang Diberikan akan sesuai dengan kondisi yang objektif. Rata-rata pendidikan dalam Penelitian ini berada pada jenjang (SMA) atau Sekolah Menengah Atas (SMK) Sekolah Menengah Kejuruan dan (MA). Untuk mengetahui jenjang pendidikan Informan maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6: Jenjang Pendidikan Informan Camat dan Kepala Desa

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD/MI	-	-
2	SMP/MTS	-	-
3	SMA/SMK/MA	3	80%
4	DIPLOMA	-	-
5	SARJANA	2	40%
6	P. SARJANA	-	-
Jumlah		5	100%

Sumber: Olahan Data 2019

Dari table 7 di atas dapat dikatakan bahwa jenjang pendidikan informan Dalam penelitian ini yang dominan adalah SMA/SMK/MA yaitu sebanyak 3 Orang dengan presentase 80%, sarjana sebanyak 2 orang dengan presentase Sebanyak 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan cukup baik dalam memberikan informasi terkait dengan peranan Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

3. Masa Bekerja

Masa Untuk mengetahui masa bekerja informan maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7: Lama Bekerja Informan Camat dan Kepala Desa

No	Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1	< 1 tahun	-	-
2	1 tahun-2 tahun	-	-
3	3 tahun – 4 tahun	4	80%
4	>4 tahun	1	20%
Jumlah		5	100%

Sumber: *Olahan Data 2019*

Dari table 8 di atas dapat dikatakan bahwa jumlah informan yang lebih lama bekerja yaitu dari tahun 3tahun-4tahun yaitu sebanyak 80%. Dapat disimpulkan bahwa produktivitas kerja karyawan tidak mungkin rendah karena Masa bekerja yang begitu lamanya tentu akan memberikan suatu kemahiran Dan pengalaman dalam bekerja, dengan itu tingkat kesalahan dalam Melaksanakan pekerjaan rasanya sangat kecil.

B. Pembahasan Hasil Penelitian Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalwan

Peranan memiliki makna yaitu seperangkat tingkatan yang diharapkan dan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Suatu tingkat kedudukan atau tugas utama yang harus dilaksanakan, yang dilakukan oleh manusia dalam melakukan suatu kegiatan dari adanya objek. Camat memiliki peran Dalam membinaa penyelenggaraan pemerintah Desa dengan itu Camat harus

mengambil langkah-langkah atau aktivitas yang akan diambil dalam membina Penyelenggaraan Desa tersebut. Peranan publik yang diberikan Camat pada kepala Desa adalah dengan adanya Pembinaan dan Pengawasan dari Camat Untuk menjalankan suatu program agar dapat berjalan dengan baik, dan Camat Juga harus membangun komunikasi yang baik terhadap pemerintahan Desa Agar pemerintahan Desa dapat berkomunikasi juga ada kesulitan suatu pekerjaan.

Untuk melihat Peranan Camat dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepala Desa diKecamatan Teluk Merantri Kabupaten Pelalawan Dapat dilihat melalui beberapa variabel yaitu Pembinaan penyelenggaraan Kegiatan Desa dalam Keluarahan dengan indikatornya yaitu tujuan dan saran, pembinaan yang Profesional, materi Pembinaan dan Pengembangan harus disesuaikan dengan Tujuan yang hendak dicapai, beserta Pembinaan harus memenuhi Persyaratan. Adapun variabel berikutnya yaitu pengawasan yang memiliki indikator menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan menentukan kebutuhan tindakan koreksi.

Camat secara umum memimpin roda penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam pemerintahan desa, maupun pemerintahan kelurahan, tugas pembangunan dan kehidupan masyarakat. Sebagai seorang pejabat, camat seharusnya mempunyai program pembinaan supaya segala urusan pemerintahan dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintahan desa. Adapun perincian hasil penelitian penulis tentang peranan camat dalam

melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa di kecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan berdasarkan variabel dan indikatornya.

1. Pembinaan

Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dalam melakukan segala pekerjaan dan kedisiplinan didalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pembinaan yaitu segala usaha yang berhubungan langsung dengan indikator tujuan dan saran, pembinaan yang profesional, materi pembinaan, dan peserta pembinaan. Pembinaan merupakan suatu proses dimana seseorang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dan mencapai suatu tujuan organisasi, oleh sebab itu proses ini terkait oleh beberapa tujuan organisasi.

a. Tujuan dan saran

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa
2. Menetapkan jadwal sosial dan pembinaan
3. Melakukan koordinasi kerja dengan kepala desa

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan penyusunan program desa dengan indikator tujuan dan saran. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu apakah Camat ada membuat penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa?

Camat memberikan jawaban :”*Adanya program yang dilakukan pemerintah kecamatan teluk meranti yang diberikan kepada kepala desa setiap desa di kecamatan teluk meranti*”. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti Apakah camat pernah menetapkan jadwal sosialisasi dan pembinaan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa?

Camat memberikan jawaban: “*Camat selalu menetapkan jadwal sosialisasi pembinaan kepada setiap desa*”. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk Apakah camat pernah melakukan koordinasi kerja dengan kepala desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa?

Camat memberikan jawaban : “*Terkadang camat juga melakukan koordinasi kerja dengan kepala desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa*”. (16 Oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Labuhan Bilik mengenai tujuan dan saran

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa labuhan bilik pernyataannya yaitu : Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat ada membuat penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: ”*Camat pernah memberikan program untuk desa dan selaku kepala desa*

harus dapat mempertanggung jawabkan program yang harus dijalankan". (17 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa yang pernyataannya yaitu : Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Pak camat pernah melakukan koordinasi setiap tahun dengan kepala desa". (17 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala Desa Pulau Muda mengenai tujuan dan saran

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepala desa apakah camat ada membuat penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat telah melakukan program yang diberikan kepada desa dan kepala desa harus bisa melaksanakan program yang ditetapkan dengan baik". (18 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Perna, camat selalu melakukan koordinasi kepada desa dan kepala desa harus bisa mempertanggung jawabkan nya". (18 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala Desa Segamai Barat mengenai tujuan dan saran

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa segamai barat maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat ada membuat penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya, camat akan memberikan program kepada kepala desa sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku kepada kepala desa". (19 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan berupaya melakukan koordinasi tahunan kepada kepala desa sesuai dengan penetapan kerja yang ditetapkan". (19 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala desa Gambut Mutiara mengenai tujuan dan saran

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa gambut mutiara maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa pernyataannya yaitu apakah camat ada membuat penyusunan program yang akan diberikan kepada kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya, camat memberikan penyusunan program kepada kepala desa sebagai pedoman kerja yang telah ditetapkan camat kepada kepala desa". (20 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *”Camat akan melakukan koordinasi disetiap desa sesuai dengan kerja kepala desa, sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan”*. (20 Oktober 2019)

b. Pembinaan yang Profesional

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Melakukan studi sebelum memberikan pembinaan
2. Memiliki kemampuan yang baik didalam memberikan pembinaan
3. Proses pembinaan dilakukan berkekanjutan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dengan indikator pembinaan yang profesional. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti Apakah camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan

Camat memberikan jawaban : *“Camat pernah melakukam studi sebelum memberikan binaan”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti Apakah camat memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pembinaan dalam melakukan pemerintahan dan pengawasan kepala desa

Camat memberikan jawaban : *“camat dapat melakukan pembinaan didalam pemerintahan dikeranerana camat telah mengikuti masa pelatihan sesuai dengan standar kerja kecamatan dan pemhaman tentang pembinaan dan pengawasan terhadap desa”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan dalam pembinaan dan pengawasan kepala desa

Camat memberikan jawaban : *“iya camat akan memberikan pembinaan secara berkelanjutan dikarenakan setiap kepala desa memerlukan bimbingan secara langsung dari camat”*.
(16 Oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Labuhan Bilik mengenai pembinaan yang profesional

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa labuhan bilik maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dengan pernyataan Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan

Kemudian beliau memberikan jawaban: *“Pak camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan”*. (17 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa labuhan bilik dengan pernyataan yaitu :Menurut bapak selaku kepala desa apakah proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *“Camat telah melakukan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan setiap desa dengan ketentuan yang berlaku didalam desa”*.
(17 Oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Pulau Muda mengenai pembinaan yang profesional

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dengan pernyataan apakah camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat selalu memberikan studi sesuai kebutuhan setiap desa". (18 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya, camat akan memberikan proses pembinaan secara berkelanjutan disetiap desa". (18 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala Desa Segamai Barat mengenai pembinaan yang profesional

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa segamai barat maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dengan pernyataan apakah camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan memberikan studi kepada kepala desa sesuai standar pelaksanaan penyelenggaraan kepala desa". (19 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan?

Kemudian beliau mberikan jawaban: *"Iya, camat akan melakukan proses pembinaan berkelanjutan sesuai dengan penetapan pemerintahan desa". 19 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala Desa Gambut Mutiara mengenai pembinaan yang profesional

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dengan pernyataan apakah camat pernah melakukan studi sebelum memberikan pembinaan

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan memberikan studi pembinaan kepada kepala desa sebagai penopong peningkatan kerja kepala desa". (20 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah proses pembinaan dilakukan secara berkelanjutan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat memberikan proses binaan secara berkelanjutan kepada kepala desa sesuai kinerja yang telah ditentukan". (20 Oktober 2019)*

c. Materi Pembinaan

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Menetapkan sasaran kerja
2. Menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja
3. Materi pembinaan dapat dimengerti dengan baik

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dengan indikator materi pembinaan. maka peneulis melakukan

wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu apakah camat ada menetapkan sasaran kerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa

Camat memberikan jawaban : *“camat akan melakukan penetapan sasaran kerja sesuai dengan ketentuan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa untuk mengetahui hasil kerja setiap kepala desa”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian penulis bertanya kembali apakah camat menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja

Camat memberikan jawaban : *“camat akan memberikan suatu pembahasan sesuai dengan kerjanya masing masing agar kepala desa memahami sasaran kerja ruang lingkup tentang desa”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian penulis bertanya kembali apakah materi pembinaan yang diberikan oleh camat dapat dimengerti dengan baik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepala desa

Camat memberikan jawaban : *“camat akan menjelaskan poin poin penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa sebaik baik mungkin supaya bisa di mengerti dan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik”*. (16 oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Labuhan Bilik mengenai materi pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa labuhan bilik maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa labuhan bilik dengan pernyataan yaitu : Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat ada menetapkan saran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Bapak camat sudah menerapkan saran kerja dan telah dilaksanakan oleh pihak desa". (17 Oktober 2019)*

Kemudia peneliti bertanya kembali kepada kepala desa : Menurut bapak selaku kepala desa apakah camat ada menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Bapak camat apabila melakukan sosialisasi kepada kepala desa telah menetapkan materi pembahasan yang akan disampaikan". (17 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala desa Pulau Muda mengenai materi pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa pulau muda dengan pernyataan yaitu apakah camat ada menetapkan saran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat selalu memberikan saran kepada desa, supaya pelaksanaan kegiatan desa berjalan dengan baik". (18 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat ada menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan memberikan meteri sebelum melakukan penetapan sesuai dengan sasaran kerja kepala desa". (18 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala desa Segamai Barat mengenai materi pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa segamai barat maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa dengan pernyataannya apakah camat ada menetapkan saran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan melakukan penetapan standar kerja sesuai dengan penyelenggaraan yang ditetapkan untuk kepala desa". (19 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat ada menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan memberikan materi sesuai dengan sasaran kerja diperangkat desa, yang dapat dipertanggung jawabkan oleh kepala desa". (19 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala desa Gambut Mutiara mengenai materi pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di gambut mutiara muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa yaitu apakah camat ada menetapkan saran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya, camat akan memberikan penetapan kerja sesuai dengan standar kerja kepala desa". (20 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah camat ada menetapkan materi pembahasan sesuai dengan sasaran kerja

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya, sebelum memberikan bimbingan atau materi, camat akan memberikan konsultasi dan supervisi sesuai sasaran kerja yang berlaku". (20 Oktober 2019)*

d. Peserta Pembinaan

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa
2. Pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan
3. Memahami program yang disusun atau direncanakan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dengan indikator peserta pembinaan. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu apakah peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa

Camat memberikan jawaban : *"iya harus pemerintahan desa dikarenakan perpanjangan tangan camat terhadap desa ada kepala desa dan perangkat desa jadi peserta pembinaan harus perangkat desa itu sendiri". (16 Oktober 2019)*

Kemudian penulis bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah pembinaan yang diberikan berdasarkan tugas yang diberikan

Camat memberikan jawaban : *"camat akan memberikan pembinaan berdasarkan tugas tugas nya masing masing supaya setiap kepala desa memahami dari hasil pembinaan itu sendiri". (16 Oktober 2019)*

Kemudian penulis bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah peserta pembinaan kepala desa memahami program yang disusun atau direncanakan

Camat memberikan jawaban : *“camat akan memberikan pemahaman masalah pembinaan yang telah disusun atau direncanakan kepada kepala desa supaya setiap kepala desa mengerti akan tugas atau program yang akan dijalankan”*. (16 Oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Labuhan Bilik mengenai peserta pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa labuhan bilik maka peneliti melakukan wawancara dengan pernyataan menurut bapak selaku kepala desa apakah peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *” iya karena camat hanya melakukan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa”*. (17 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa labuhan bilik yaitu menurut bapak selaku kepala desa apakah pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *”iya karena camat telah memberikan arahan dan pembinaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki”*. (17 Oktober 2019)

Wawancara kepada kepala desa Pulau Muda mengenai peserta pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara dengan pernyataan apakah peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan melakukan pembinaan hanya dengan perangkat pemerintahan, sesuai dengan penetapan pembinaan yang ada". (18 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan?

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Iya camat akan memberikan beberapa perbedaan pembinaan sesuai dengan kemampuan dan tugas yang akan dijalankan kepala desa". (18 Oktober 2019)*

Wawancara kepada kepala Desa Segamai Barat mengenai peserta pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di segamai barat maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala dengan pernyataan apakah peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa

Kemudian beliau memberikan jawaban: *"Camat akan memberikan pembinaan berdasarkan perangkat desa yang mana telah ditetapkan sesuai kemampuan yang berlaku didalam desa". (19 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan?

Kemudian beliau memberikan jawaban : *"Iya, camat melakukan pembedaan berdasarkan tugas yang dibebankan kepada kepala desa yang mana telah ditetapkan sesuai mutu*

yang berlaku diperangkat pemerintahan desa”. (19 oktober 2019)

Wawancara kepada kepala Desa Gambut Mutiara mengenai peserta pembinaan

Untuk mengetahui pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa pulau muda maka peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa apakah peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa

Kemudian beliau memberikan jawaban : *”Iya, camat akan menetapkan peserta pembinaan harus perangkat pemerintahan desa untuk memberikan bimbingan dan penghargaan kepada lembaga masyarakat desa”. (20 Oktober 2019)*

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada kepala desa apakah pembinaan dibedakan berdasarkan tugas yang diberikan

Kemudian beliau memberikan jawaban : *”Iya, camat akan membedakan pembinaan tugas, untuk menetapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan petani masyarakat desa”. (20 Oktober 2019)*

2. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pembinaan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan pengukuran yang ditetapkan. Didalam variabel pengawasan ini memiliki 4 indikator diantaranya yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan menentukan tindakan koreksi.

a. Menetapkan standar

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Menetapkan standar jumlah pegawai pemerintahan desa
2. Menetapkan target pelaksanaan program pemerintahan desa
3. Menetapkan jadwal pengawasan

Untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa yang dilakukan oleh camat dalam membina dan mengawasi dengan indikator menetapkan standar. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah menetapkan standar jumlah pegawai pemerintahan desa?

Camat memberikan jawaban : *“Camat pernah menetapkan standar jumlah pegawai pemerintah desa”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah menetapkan target pelaksanaan program pemerintah desa

Camat memberikan jawaban : *“Camat selalu melakukan penetapan target pelaksanaan program pemerintah”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah menetapkan jadwal pengawasan

Camat memberikan jawaban : *“camat akan menetapkan jadwal pengawasan sesuai dengan ketentuan untuk melihat hasil pengawasan berjalan dengan baik”*. (16 oktober 2019)

b. Mengukur kinerja

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Menerima laporan kerja dari pemerintahan desa
2. Melakukan pengawasan secara langsung
3. Melakukan koordinasi kepada masyarakat terkait kinerja pemerintahan desa

Untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan mengawasi dengan indikator mengukur kinerja. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah menerima laporan kerja dari pemerintah desa

Camat memberikan jawaban : *“Terkadang camat menerima laporan kerja pemerintah desa”*. (16 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah melakukan pengawasan secara langsung

Camat memberikan jawaban : *“Camat juga melakukan pengawasan secara langsung”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah melakukan koordinasi masyarakat terkait kinerja pemerintahan desa

Camat memberikan jawaban : *“camat akan melakukan koordinasi terhadap desa sesuai dengan peraturan kinerja pemerintahan desa,dimana ada tugas tugas penting dalam*

koordinasi terkait dengan kinerja pemerintahan desa”. (16 Oktober 2019)

c. Membandingkan kinerja dengan standar

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Memberikan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan
2. Membandingkan hasil kerja dengan target yang diberikan sebelumnya
3. Melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan

Untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan mengawasi dengan indikator membandingkan kinerja dengan standar. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Camat Teluk Meranti apakah Camat pernah memberikan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepala desa

Camat memberikan jawaban: “iya camat akan memberikan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja kepala desa, untuk mencapai tujuan yang sesuai atau yang ditetapkan”. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah membandingkan hasil kerja dengan target yang diberikan sebelumnya

Camat memberikan jawaban : “camat akan melakukan perbandingan hasil kerja untuk mengukur target yang ditentukan tercapai dengan baik dan sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan”. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah melakukan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan desa

Camat memberikan jawaban :*“iya camat sangat berperan dalam melakukan evaluasi untuk menentukan suatu hasil pelaksanaan desa sebagai patokan program kerja desa”*.
(16 Oktober 2019)

d. Menentukan kebutuhan tindakan koreksi

Adapun yang menjadi item penilaian adalah

1. Membuat laporan terkait hasil kerja pemerintahan desa
2. Memberikan penghargaan apabila target tercapai
3. Memberikan tindakan sanksi apabila target tidak tercapai

Untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa yang dilakukan oleh camat dalam pembinaan dan mengawasi dengan indikator menentukan kebutuhan tindakan koreksi. maka penulis melakukan wawancara kepada camat teluk meranti kabupaten pelalawan penulis mengajukan pertanyaan yaitu Kemudian peneliti bertanya kembali kepada Camat Teluk Meranti apakah camat pernah membuat laporan terkait hasil kerja pemerintahan desa

Camat memberikan jawaban: *“iya camat akan membuat laporan terkait dari hari kerja pemerintahan desa, untuk mengetahui seberapa besar progres yang telah terlaksana dalam pemerintahan desa”*. (16 Oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat pernah memberikan penghargaan apabila target tercapai

Camat memberikan jawaban: *“camat akan memberikan penghargaan kepada kepala desa apabila target yang diinginkan berjalan sesuai dengan yang ditentukan, untuk memberikan motivasi kepada desa desa yang lain nya”*.
(16 oktober 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada camat teluk meranti apakah camat memberikan sanksi apabila target tidak tercapai

Camat memberikan jawaban: *“iya sanksi diberikan oleh camat supaya setiap kepala desa mampu meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan dan direncanakan oleh progres di kecamatan”*. (16 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara peneliti dengan camat dan kepala desa dikecamatan teluk meranti kabupaten pelalawan terkait tentang peranan camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai penyusunan program sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala.

Dari analisis dan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana yang sudah dijelaskan maka peneliti menyimpulkan :

1. Pembinaan

- a. Tujuan dan saran, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa camat sebelum melakukan pembinaan maka melakukan penyusunan perogram yang akan diberikan kepada kepala desa setelah itu, camat dapat menetapkan jadwal dan melakukan koordinasi kerja terhadap kepala desa. Dengan adanya program yang diberikan camat kepada kepala

desa maka kepala desa dapat menjalankan agar desa tersebut menjadi sejahtera.

- b. Pembinaan yang profesional berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebelum melakukan pembinaan kepada kepala desa maka camat akan melakukan pembelajaran dari pemerintahan pusat dengan adanya pembelajaran maka camat memiliki kemampuan yang cukup baik dan proses pembinaan dapat berjalan dengan baik
- c. Materi pembinaan, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sasaran kerja dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan camat dapat mengetahui hasil kerja kepala desa saat memberikan pembinaan maka camat akan menjelaskan bagian poin-poin penting yang terdapat didalam materi pembahasan tersebut tanggapan. kepala desa dapat menjalankan standar kerja sesuai dengan penyelenggaraan yang ditetapkan
- d. Peserta pembinaan, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan peserta dalam pembinaan pemerintah kecamatan kepada desa harus perangkat pemerintahan desa dan pembinaan yang dilakukan berdasarkan dengan tugas yang diberikan dan dapat memahami seluruh program yang sudah disusun atau direncanakan sebelumnya oleh pemerintahan kecamatan.

2. Pengawasan

- a. Menetapkan standar berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan penetapan standar jumlah pegawai yang dilakukan camat dengan menetapkan target pelaksanaan program pemerintahan desa sesuai dengan jadwal pengawasan yang ditentukan
- b. Mengukur kinerja camat, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sangat jarang menerima laporan kerja dari pemerintahan desa namun, camat melakukan pengawasan langsung ke desa dan melakukan koordinasi kepada masyarakat terkait kinerja yang dilakukan pemerintahan desa.
- c. Membandingkan kinerja dengan standar, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan adanya rencana camat untuk memberikan evaluasi kerja dan membandingkan hasil kerja untuk mengatur target yang ditentukan tercapai dengan baik. Evaluasi yang dilakukan camat juga sangat berperan penting terhadap menentukan suatu hasil pelaksanaan desa sebagai patokan program kerja.
- d. Menentukan kebutuhan tindakan koreksi, berdasarkan uraian dari wawancara diatas maka peneliti dapat menyimpulkan adanya laporan kerja yang dilakukan pemerintah desa kepada camat dan tindakan camat dapat memberikan penghargaan ataupun tindakan sanksi apabila target tidak tercapai.

Dengan demikian, dari hasil penelitian secara konferensif sebagaimana yang telah dijelaskan melalui indikator-indikator diatas maka hasil penelitian tentang Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan “ belum terlaksana dengan baik ” oleh karena itu, proporsi penelitian **“Persanan Camat Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepla Desa di Kecamatan Teluk Meranti Belum Terlaksana Sebagaimana Dengan Mestinya”**. Artinya kepala desa masih belum merasa program materi pembinaan yang diberikan oleh camat kepada kepala desa desa masih ada kendala yang dihadapi, yaitu kepala desa hanya menerima materi pembinaan yang diberikan camat hanya sekali dalam setahun dimana akan berakibat kinerja kepala desa tidak berjalan dengan baik dikarenakan kepala desa di kecamatan teluk meranti rata-rata memiliki jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat.. Hal ini dikarenakan masih adanya kekurangan dalam melaksanakan program yang diberikan oleh camat yaitu dalam kondisi keterlambatan saat masyarakat melakukan pengurusan surat ke desa dan desa melaporkannya ke camat kemudian camat dengan kesibukannya maka dalam mengurus surat ke camat dapat terhambat dan membuat masyarakat kurang mengerti dengan kesibukan seorang Camat. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan camat di anggap sudah cukup. Karna adanya pembinaan dan pengawasan pekerjaan kepala desa menjadi ringan dan dapat terbantu. Pengawasan yang dilakukan camat berperan memberikan evaluasi kerja terhadap pelaksanaan yang dilakukan Kepala Desa ke masyarakat.

C. Faktor-faktor Penghambat Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan

a. Tujuan dan saran pembinaan

Masih kurangnya pemahaman aparatur Desa terhadap tujuan dan saran yang telah Camat lakukan tentang penyusunan program yang di berikan camat secara langsung.

b. Pembinaan yang profesional

Masih kurangnya partisipasi masyarakat didalam menerima pembinaan yang profesional yang camat lakukan terhadap kepala desa.

c. Materi pembinaan dan pengembangan

Ada beberapa hal yang terjadi dilapangan dalam penetapan materi pembinaan terhadap kepala desa, dimana ketidak pahaman kepala desa dalam pemahaman materi pembinaan dan pengembangan yang seharusnya dipahami setiap kepala desa

d. Peserta pembinaan

Didalam peserta pembinaan telah ditetapkan aparatur desa dari kecamatan, banyak juga yang terjadi setiap desa tidak menghiraukan penetapan pembinaan, sehingga yang terjadi di desa tidak sesuai dengan peraturan di kecamatan

2. Pengawasan

a. Menetapkan standar

Kecamatan telah menetapkan standar kerja kepala desa sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kemajuan desa, tetapi kepala desa banyak juga yang belum menguasai masalah standar kerja dikarenakan tingkat pendidikan kepala desa yang pada umumnya hanyalah tamatan SMA sederajat

b. Mengukur kinerja

Camat akan memberikan pengawasan kinerja terhadap kepala desa untuk mengukur hasil kerja kepala desa, dimana kepala desa harus cepat tanggap dalam mengukur kinerja, tetapi banyak yang belum paham mengenai mengukur kinerja yang sudah ditetapkan sehingga terbengkalainya pekerjaan di desa

c. Membandingkan kinerja dengan standar

Kepala desa seharusnya paham dengan perbandingan kinerja yang sudah ditetapkan oleh kecamatan dimana kepala desa adalah pimpinan didalam ruang lingkup desa, akan tetapi sebagian besar kepala desa tidak menjalankan kerja dengan ketentuan yang ada.

d. Menentukan kebutuhan tindakan koreksi

Camat akan menentukan koreksi hasil kerja kepala desa untuk menentukan tindakan kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, tetapi banyak kepala desa yang tidak sesuai dengan hasil atau ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peranan Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu “Persanan Camat Dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kepala Desa di Kecamatan Teluk Meranti Belum Terlaksana sebagaimana dengan mestinya”. Dikarenakan kepala desa masih belum merasa program materi pembinaan yang diberikan oleh camat kepada kepala desa masih ada kendala yang dihadapi, yaitu kepala desa hanya menerima materi pembinaan yang diberikan camat hanya sekali dalam setahun dimana akan berakibat kinerja kepala desa tidak berjalan dengan baik dikarenakan kepala desa di kecamatan teluk meranti rata-rata memiliki jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat. sulit menanggapi materi pembinaan tersebut dengan baik.
2. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pembinaan dan pengawasan kepala desa dikecamatan Teluk Meranti Kabupaten pelalawan Hambatan yang diamalmi yaitu berupa:

a. Pembinaan

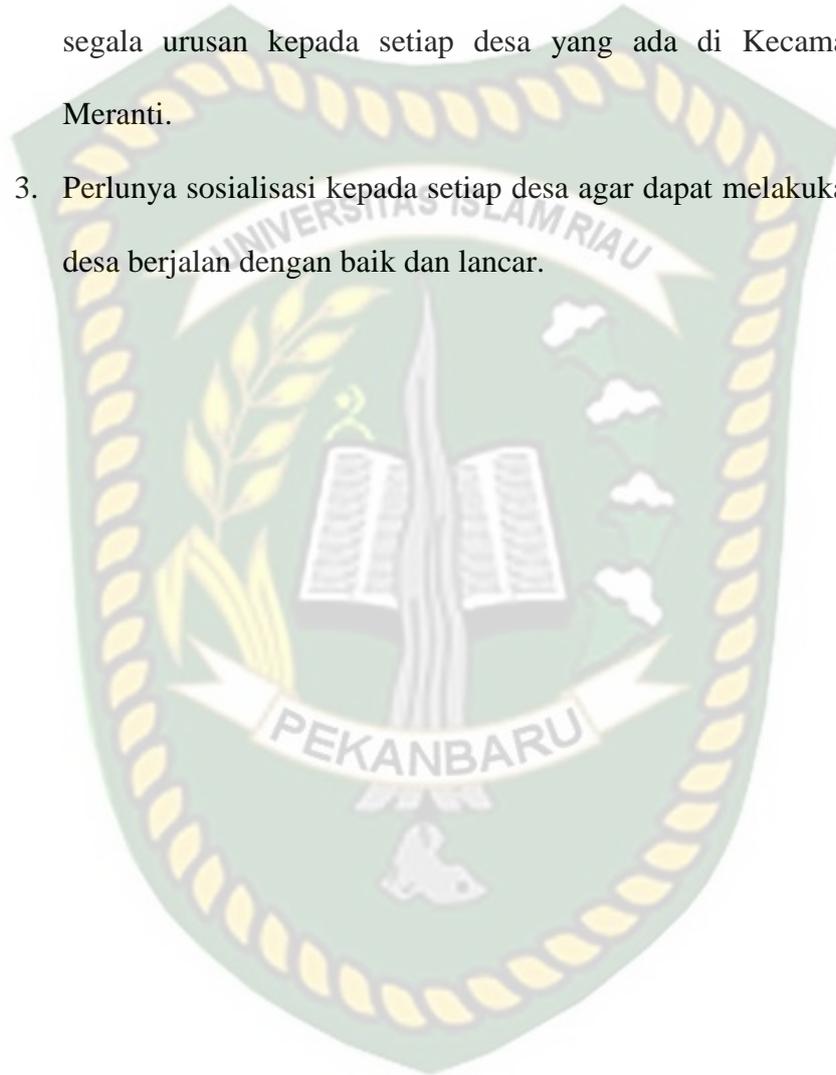
1. Masih kurangnya pemahaman yang diberikan camat kepada aparaturnya desa.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat saat menerima pembinaan dengan profesional kepada kepala desa.
3. Kurangnya pemahaman kepala desa saat diberi pemahaman materi oleh camat.
4. Kurangnya kepekaan terhadap aparaturnya desa saat diberikan penetapan pemahaman dari camat.

b. Pengawasan

1. Kurangnya pemahaman tentang masalah standar kerja kepala desa sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Kurangnya pemahaman mengenai pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan hambatan pekerjaan di desa.
3. Pemahaman kepala desa terhadap perbandingan kerja dari camat kepada kepala desa yang sebagian besar belum dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Kurangnya kepekaan kepala desa tentang koreksi hasil kerja membuat kepala desa melakukan pekerjaan tidak sesuai hasil dan ketentuan yang ada.

B. Saran

1. Perlunya pembinaan lebih yang membuat Kepala Desa dan Staff lainnya dapat memahami pembinaan yang dilakukan.
2. Sebaiknya pemerintah Kecamatan Teluk Meranti mempermudah segala urusan kepada setiap desa yang ada di Kecamatan Teluk Meranti.
3. Perlunya sosialisasi kepada setiap desa agar dapat melakukan program desa berjalan dengan baik dan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu s.p, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Musanef. 1992. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis*.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Akarta: Rineka Cipta.
- R. Terry George. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Sedarmayanti. 2004. *Pengembangan Kepribadian Pegawai*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Siagian, Sondang p. 2003. *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedarjono Soekanto, 2009: 212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi Baru, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwatno, & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Veithzal, Rivai, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Cetakan pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi & Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.

Zulkifli, 2009. Fungsi-fungsi Manajemen. Pekanbaru, UIR Press.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Negara republic Indonesia Nomor 12 tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

Undang-undang Negara republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 *Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Undang-undang Negara republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Zulkifli, DKK. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Ulasan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013.* Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

